



URGENSI PENGATURAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG RADIO TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (RUURTRI)



LATAR BELAKANG

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menetapkan RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) menjadi prioritas. Prospek RTRI sebagai LPP yang merupakan peleburan dari RRI dan TVRI diarahkan untuk mampu menjalankan perannya sebagai penyelenggara penyiaran yang menyiarkan siaran yang dibutuhkan oleh masyarakat.



BENTUK LEMBAGA RTRI

Lembaga RTRI adalah lembaga negara yang harus memiliki kemampuan untuk melakukan pembinaan kepegawaian termasuk untuk melakukan rekrutmen pegawai. Lembaga RTRI juga perlu memiliki kemandirian dalam merencanakan dan mengelola anggarannya.

PENYELENGGARAAN PENSIARAN

Format penyelenggaraan siaran secara digital dan pengembangan usaha melalui siaran dengan platform digital penyiaran sangat cocok untuk penyelenggaraan RTRI dengan dibarengi peningkatan kemampuan penunjang siaran yang berkualitas.



PENGELOLAAN ASET RTRI

Diperlukan penguatan kualitas dan kuantitas aset pemancar digital dalam rangka menjalankan fungsi sebagai penyelenggara penyiaran multipleksing. Untuk aset *intangibile*, klaim hak cipta juga dianggap penting untuk melindungi dari pembajakan/klaim dari pihak ketiga.

RUANG LINGKUP PENGATURAN RTRI

Lingkup utama yang harus diatur dalam regulasi RTRI nantinya, harus beranjak dari proses bisnis RTRI sebagai lembaga penyiaran publik. Terkait dengan lingkup besar RTRI sebagai LPP, maka terdapat dua pembidangan besar yang melandasi aktivitas penyiaran yaitu berita dan program siaran.

POLITIK NEGARA DALAM PEMBENTUKAN RTRI

Pemerintah daerah mengharapkan bahwa kegiatan kerjasama antara LPP dengan pemerintah daerah dalam menyiarkan kegiatan kebudayaan tetap dilangsungkan agar masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja mengetahui mengenai kebudayaan di daerahnya.

BENTUK BIROKRASI RTRI

Permasalahan umum yang ditemukan dalam penelitian kali ini lebih banyak terkait permasalahan manajemen SDM seperti kewenangan perekrutan SDM baru dalam pemenuhan ketersediaan tenaga yang kreatif dan kompeten dalam hal teknis, pengelolaan pola dan materi diklat, penempatan SDM *right man on right place*, pola karier dan promosi, pola mutasi.



REKOMENDASI

- Menegaskan status LPP sebagai lembaga negara independen yang memiliki karakteristik public broadcasting
- Konten siaran yang disiarkan oleh LPP TVRI dan LPP RRI memerlukan pengembangan atau pembentukan program baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat akan penyiaran publik.

